

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN APBS  
DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN MUTU TERPADU  
DI SMK NEGERI 1 JOGONALAN, KABUPATEN KLATEN TAHUN 2012**

**ARTIKEL PUBLIKASI**

Diajukan kepada  
Program Studi Manajemen Pendidikan  
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister dalam Ilmu Manajemen Pendidikan



Oleh

**SRIDADI**  
NIM: Q 100 100 182

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2012**

DOKUMEN ARTIKEL PUBLIKASI

TRANSPARANSI PENGELOLAAN APBS  
DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN MUTU TERPADU  
DI SMK NEGERI 1 JOGONALAN, KABUPATEN KLATEN TAHUN 2012

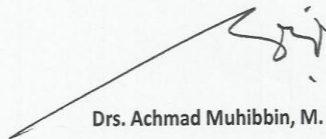
Disahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Tjipto Subadi, M. Si

Pembimbing II,



Drs. Achmad Muhibbin, M. Si

**SURAT PERNYATAAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Sridadi  
NIM/NIK/NIP : Q 100 100 182  
Fakultas/Jurusan : Magister Manajemen Pendidikan  
Jenis : ~~Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian~~  
Judul : Transparansi Pengelolaan APBS dalam Perspektif  
Manajemen Mutu Terpadu di SMK Negeri 1 Jogonalan,  
Kabupaten Klaten Tahun 2012

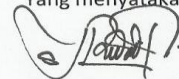
Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/ mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, 5 November 2012

Yang menyatakan



(Sridadi)

## **Transparansi Pengelolaan APBS dalam Perspektif Manajemen Mutu Terpadu di SMK Negeri 1 Jogonalan, Klaten tahun 2012**

Oleh:

Sridadi<sup>1</sup>, Tjipto Subadi<sup>2</sup>, Ahmad Muhibin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Pascasarjana UMS Surakarta

<sup>2</sup>Staf Pengajar Pascasarjana UMS, <sup>3</sup>Staf Pengajar Pascasarjana UMS

### **ABSTRACT**

This study aims to describe: (1) the strategy of formulatig RKAS; (2) the realization of APBS; (3) the regulatory process APBS; (4) the transparency strategy RKAS preparation, realization and supervision of APBS; (5) the meaning of transparency management APBS in perspective of Total Quality Management. This study used qualitative methods with the design of phenomenology. The experiment was conducted at SMK Negeri 1 Jogonalan with informants of: Vice Principal, Head of Competence Skills, Teacher, Treasurer, School Committee and parents of students. Methods for collecting data using in-depth interviews, observation and document study. Data analysis techniques using the interactive model. To test the validity of the data was extended observation, stable observation, triangulation, peer examination, analisys negative cases, and checking members.

The results showed: (1) increasing awareness of the importance of RKAS, the involvement of the team and effective communication facilitate RKAS preparation; (2) identification of the sources of school revenue facilitate budget management, (3) increasing understanding of the rules, the technical guide , procedures and mechanisms facilitate management activities. (4) the involvement of management elements, effective financial controls and evidence of the transaction reduces the deviation, (5) transparency APBS shown by the engagement team, understanding the basic tasks and rules are valid proof of the transaction. From the interpretation point of view showed that the better consciousness, collectivity management, comprehensive and integrated thinking, effective communication and coordination, adherence to rules and a sense of belonging will increase transparency in the management program of APBS in perspective of integrated quality management.

Keywords: transparency, APBS, total quality management, SMK

## 1. Pendahuluan

Salah satu tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar dapat mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas upaya peningkatan pendidikan merupakan menjadi keniscayaan. Pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (4) mengamanatkan bahwa: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (UU Guru dan Dosen, 2005:1)

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 sampai sekarang sektor pendidikan telah mengalami berbagai perubahan kebijakan. Perubahan yang sangat fundamental yakni setelah reformasi. Reformasi di Indonesia membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan yang dimaksud terutama menyangkut kehidupan sosial sentralistik ke desentralistik. Perubahan sentralistik ke desentralistik UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkaitan dengan pelaksanaan otonomi yang berbasis daerah kota / kabupaten dan desa yang berdampak terhadap perkembangan demokratisasi.

Di era demokratisasi dan otonomi daerah saat ini sangat diperlukan adanya tata pemerintahan (Good Governance). UNDP mengemukakan Sembilan prinsip, yakni partisipasi, rule of law, transparansi, responsiveness, orientasi consensus, kesetaraan. (Syakrani & Syahrani, 2009:131-132)

Pendidikan merupakan salah satu bidang dari kesebelas bidang yang didesentralisasikan. Desentralisasi adalah penyerahan sebagian kewenangan dan tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satu bidang

tugas dan kewenangan yang diserahkan pengelolaannya ke daerah-daerah, khususnya kabupaten / kota adalah bidang pendidikan. (Amtu, 2011:105).

Sekolah merupakan institusi penyelenggara proses pendidikan dan pembelajaran. Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan. Pendidikan tanpa dukungan biaya yang memadai proses penyelenggaraan pembelajaran di sekolah tidak akan berjalan sesuai harapan. Menyadari pentingnya pendidikan merupakan faktor penentu terwujudnya tujuan nasional, maka pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (4).

Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan Negara dinyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan Negara oleh pemerintah (pusat dan / daerah) harus dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ketentuan pengelolaan biaya pendidikan oleh institusi pendidikan mencakup kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban APBS.

APBS merupakan pilar manajemen sekolah, maka semua kegiatan sekolah direncanakan tidak hanya sekedar teknis pelaksanaan tetapi juga menyangkut non teknis yakni pendanaan. Dana yang diperoleh dari pemerintah dan masyarakat serta dana bantuan lainnya yang mungkin didapatkan sekolah diatur sedemikian rupa sehingga penggunaannya jelas dan terbuka. Setiap poin kegiatan merupakan program bersama setiap civitas di sekolah dan stakeholder sekolah, maka mereka harus memahami

dan mengerti apa yang terjadi saat perencanaan dan penerapan APBS di sekolah.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan APBS yang memenuhi prinsip *good governance* adalah transparansi agar tidak terjadi salah pengertian di antara masing-masing elemen. Ketika terjadi kemandegan program yang disebabkan kesulitan penerapan program atau kondisi dana yang kurang mencukupi, maka semua pihak yang terkait segera mengetahuinya dan berusaha untuk segera mengkondisikan hal tersebut. Jauh yang tidak kalah penting dengan keterbukaan ini, maka tidak ada saling curiga terhadap manajemen yang diberlakukan di sekolah.

Penyusunan Rencana Kerja Sekolah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah telah dilaksanakan oleh sekolah, namun sesuai perkembangan kebijakan pemerintah masih dibutuhkan perbaikan dari sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan antara lain sejak tahun pelajaran 2009 APBS disusun berbasis kinerja. Program Kerja dan Anggaran Sekolah diarahkan pada terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan untuk sekolah terstandar dan Sekolah Berstandar Nasional dan terpenuhinya 8 Standar Nasional plus untuk RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) maupun SBI (Sekolah Berstandar Internasional).

Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 merupakan upaya sekolah untuk melakukan pembenahan manajemen guna mencapai Visi dan misi yang telah ditetapkan. Guna mencapai visi dan misi sekolah diperlukan adanya program kerja sekolah yang terarah dan APBS yang memadai dan partisipatif.

Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah dalam perspektif Manajemen Mutu Terpadu (MMT) agar sekolah tetap mendapat kepercayaan masyarakat di era persaingan yang ketat di bidang pelayanan pendidikan saat ini. Hal ini menarik peneliti untuk melihat sisi transparansi pengelolaan APBS di SMK Negeri 1 Jogonalan alasan: 1) bahwa pengelolaan

APBS berperan penting dalam mewujudkan visi misi sekolah; 2) pengelolaan APBS yang transparan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan partisipasi stakeholder sebagai kunci terciptakan iklim sekolah yang kondusif; 3) peneliti ingin memberikan kerangka teori yang signifikan dalam mencermati transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendiskripsikan: (1) Strategi penyusunan RKAS di SMK Negeri 1 Jogonalan tahun 2012; (2) Realisasi APBS SMK Negeri 1 Jogonalan tahun 2012; (3) Proses pengawasan APBS SMK Negeri 1 Jogonalan tahun 2012; (3) Transparansi strategi penyusunan RKAS, realisasi dan Pengawasan APBS; (4) Pemaknaan transparansi pengelolaan APBS dalam perspektif MMT di SMK Negeri 1 Jogonalan tahun 2012.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip Moleong (2006:4), "Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati."

Dengan memperhatikan fokus penelitian yaitu transparansi pengelolaan APBS dalam perspektif MMT di SMK Negeri 1 Jogonalan, diperlukan pengamatan yang mendalam untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang pengelolaan biaya pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi. Menurut Tjipto Subadi, (2009:68), perspektif fenomenologi dengan paradigm definisi sosial akan member peluang individu sebagai subyek penelitian (informan peneliti) melakukan interpretasi itu sampai mendapatkan makna yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.

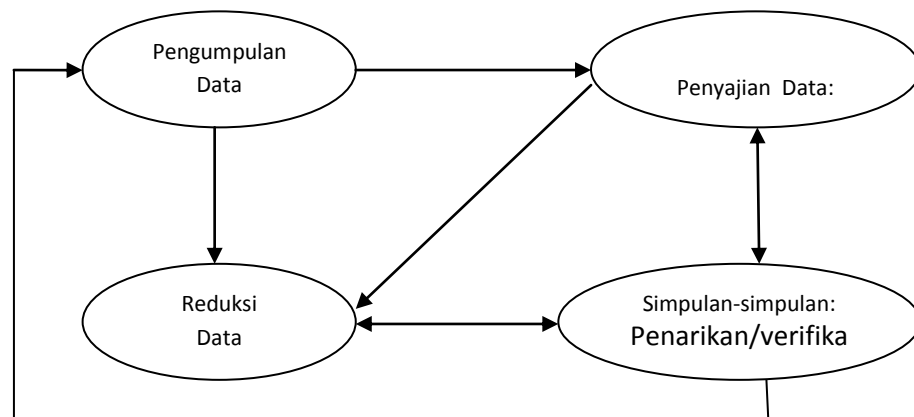


Penelitian ini mengambil lokasi di SMK Negeri 1 Jogonalan, Klaten dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) Bahwa sekolah ini sejak tahun pelajaran 2011/2012 mengalami fase-fase yang berbeda dalam penyusunan dan pengelolaan Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS); (2) SMK Negeri 1 Jogonalan sejak tahun 2011 telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu 9001:2008.

Data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti, karenanya ketepatan memilih sangat menentukan menentukan kelayakan penelitian. Menurut Sutopo, (2002:51) data atau informasi diperoleh dari berbagai sumber. Peristiwa dan aktivitas, atau perilaku sebagai sumber data yang berkaitan dengan sasaran penelitian. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2005:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. (Sugiyono, 2011: 308-309) Dalam penelitian ini arsip dan dokumen tersebut meliputi Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah SMK Negeri 1 Jogonalan tahun pelajaran 2012/2013. Informan dalam penelitian ini yaitu: (1) Kepala Sekolah Sebagai penentu keputusan strategis dan penanggung jawab dalam pengelolaan APBS; (2) Komite sekolah selaku pemberi pertimbangan dalam pengelolaan APBS; (3) Wakil Kepala Sekolah; (4) Ketua Kompetensi Keahlian selaku penanggung jawab program di tingkat Kompetensi Keahlian; (5) Bendahara Dana Komite Sekolah sebagai pelaksana teknis pengelola administrasi APBS; (6) Guru terlibat dalam kegiatan sekolah secara langsung; dan (7) Orang tua siswa sebagai orang yang terkena dampak dari pengelolaan APBS.

Guna mendapatkan data yang akurat maka peneliti menggunakan beberapa teknik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah secara interaktif yakni: (1) Observasi Partisipatif; (2) Wawancara Mendalam; (3) Dokumentasi. Dengan teknik ini diharapkan akan mendapatkan data berupa penjelasan, pendapat dan ide dari informan.

Pada penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah teknis analisis model interaktif. Menurut Milles dan Huberman (2009: 15-20) analisis data model interaktif yaitu analisis yang bergerak dalam tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan simpulan/verifikasi. Teknik analisis model interaktif dapat dilihat pada gambar berikut:



Data yang didapatkan dalam penelitian ini hanya akan diuji keabsahannya dengan melakukan uji kredibilitas (validitas internal). Menurut Moleong, (2005:327-336) Uji kredibilitas dilakukan dengan cara : (1) perpanjangan pengamatan; (2) Keajegan pengamatan; (3) triangulasi; (4) pemeriksaan sejawat melalui diskusi; (5) analisa kasus negative; (6) pengecekan anggota.

### 3. Temuan Penelitian dan Pembahasan

Transparansi pengelolaan APBS dalam perspektif Manajemen Mutu Terpadu akan tampak ketika mencermati strategi penyusunan RKAS, merealisasi dan melakukan proses pengawasan APBS serta mencermati pemaknaannya. Sekolah sebagai satuan pendidikan sesuai dengan

kewenangannya bertanggung jawab menuangkan kebijakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dalam penyusunan RKAS diawali dari kesadaran akan pentingnya RKAS sebagai acuan kegiatan sekolah untuk mencapai visi dan misi. Kegiatan sekolah yang harus dilaksanakan sangat kompleks tidak mungkin diselesaikan oleh Kepala Sekolah sendiri, maka harus melibatkan Tim yang terdiri dari unsur Wakil Kepala Sekolah, Kepala Kompetensi Keahlian, Bendahara, Kepala Tata Usaha dan Komite sekolah dalam penyusunan RKAS. Tim yang terlibat benar-benar memahami akan aturan perundang-undangan yang berlaku, tupoksi dan peran masing-masing. Keterlibatan Tim belumlah cukup untuk menjamin terlaksananya rencana kerja yang ditetapkan, akan tetapi masih memerlukan sosialisasi dan koordinasi yang efektif terhadap semua warga sekolah disamping juga pernyataan persetujuan dari instansi terkait.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa RKAS sesuatu keniscayaan bagi sekolah sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan yang sangat kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh Kepala Sekolah sendiri. Keterlibatan secara aktif melalui pemahaman tupoksi, peraturan perundang-undangan dan peran masing-masing warga sekolah dan pemangku kepentingan yang ada akan berdampak terhadap kualitas RKAS di samping juga terlaksananya koordinasi dan sosialisasi yang efektif kepada semua warga sekolah dan pemangku kepentingan. Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini mendukung dan melengkapi penelitian yang telah dilakukan oleh Ruth Carlitz, Paolo de Renzio, Warren Krafchik dan Vivek Ramkumar (2009) yang berjudul "*Budget Transparency around the World: Results from the 2008 Open Budget Survey*" yang menyimpulkan bahwa Gambaran awal tahun 2008 tentang keterbukaan dalam system pembiayaan di seluruh dunia cukup mengecewakan. Masyarakat tidak ada akses untuk memahami dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan partisipasi dalam proses pembiayaan. Survey juga menunjukkan bahwa transparansi sudah meningkat di dua tahun terakhir ditandai dengan

adanya: (1) hal-hal yang bersifat umum dan pembiayaan pada level rendah dirilis ke masyarakat; (2) adanya keterlibatan lembaga keuangan dalam peningkatan keterbukaan dan pengelolaan keuangan; (3) organisasi masyarakat juga berperan aktif dalam peningkatan keterbukaan pengelolaan keuangan. Jika dibandingkan antara hasil penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ruth Carlitz dan kawan-kawan maka adanya kesamaan bahwa keterlibatan pihak tertentu dan informasi / sosialisasi kepada khalayak diperlukan dalam pengelolaan keuangan sejak dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

Realisasi APBS terlebih dahulu harus dapat mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan sekolah, aturan perundang-undangan yang berlaku, petunjuk teknis dan prosedur pengelolaan kegiatan. Selanjutnya dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan diawali dengan mengajukan proposal yang disetujui oleh pimpinan. Bendahara dapat melayani pembayaran melalui setoran dari petugas pemungut atau melakukan pencairan dana secukupnya dari bank. Setiap transaksi yang dilakukan harus didukung dengan bukti-bukti transaksi yang sah dan dibukukan dengan tertib untuk mempertanggungjawabkan penggunaan APBS.

Dengan memperhatikan hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Motsamai J Motsamai, Lynette Jacobs dan Corene de Wet (2011) yang berjudul: "Polycy and Practice: Financial Management in Schools in the Mafeteng District or Lesotho." Hasil penelitian secara garis besar tentang adanya permasalahan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan yang meliputi: (1) terjadinya perbedaan yang mendasar antara kebijakan dan teori keuangan sekolah; (2) meskipun dokumen keuangan sudah memberikan petunjuk secara jelas tentang perencanaan dan pengelolaan, namun permasalahan yang muncul terkait dengan keuangan adalah tata cara pengumpulan / penarikan dan pencatatan keuangan sekolah sama lemahnya dengan administrasi yang mendukungnya; (3) ketiadaan petunjuk dan kebijakan yang jelas tentang

pengelolaan keuangan dan pengawasan yang diwujudkan dengan tidak memuaskannya pengelolaan keuangan dan pelaksanaan sistem pengawasan yang berubah-ubah. Kesimpulannya keberadaan kebijakan keuangan itu akan memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan.

Pengawasan pada dasarnya adalah pengendalian melalui kesesuaian ajuan dengan rencana kerja dan anggaran. Pengawasan yang efektif dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan: (1) melibatkan semua unsur manajemen dalam mensikapi setiap rencana kegiatan dan anggaran masing-masing yang sesuai dengan ; (2) mengidentifikasi dokumen bukti transaksi yang sah; (3) tertib pencatatan dan pelaporan rutin.

Ditinjau dari efektifitas pengawasan mendukung penelitian yang dilakukan oleh H. Werner (2009) yang berjudul :”A Methodology for Evaluating the Cost Effectiveness of Alternatif Management Tool in Public-Sector Institutions: An Application to Public Education” memberikan gambaran tentang beberapa variable yang telah diteliti pengawas muncul adanya ketidakefisienan penggunaan dana akan menghambat terhadap sekolah karena membatasi fleksibilitas perlakuan masukan.

Transparansi dalam penyusunan RKAS teridentifikasi melalui keterlibatan semua unsur terkait yang disertai dengan pemahaman batas-batas tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dengan keterlibatan ini maka akan dapat dihindari adanya perbedaan pendapat. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Raj Mestry (2006) yang berjudul: *“The Functions of School Governing bodies in managing school finances.”* Bahwa terjadi perbedaan pendapat antara stakeholders berkaitan dengan fungsi lembaga sekolah dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Transparansi dalam merealisasikan APBS akan terwujud dengan menetapkan dan pemahanan pada aturan pelaksanaan, petunjuk teknis prosedur yang jelas serta sistematika pengajuan pembiayaan. Pemahaman ini menjadi penting karena melalui pemahaman tingkat transparansi semakin meningkat. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh

Harika Masud dan Jason M. Lakin yang berjudul: *“Documents You Can Use: What the Open Budget Survey 2010 tells Us about the Global State or Transparency”* bahwa: tingkat transparansi di seluruh dunia itu rendah karena keterbatasan akses terhadap dokumen-dokumen kunci dan keberadaan black holl (peluang penyalahgunaan) dalam hal pembiayaan. Baru tahun 2010 penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi pengelolaan keuangan seluruh dunia meningkat meskipun skalanya masih kecil hal ini karena pemahaman dokumen kunci juga meningkat meskipun lambat. Pemerintah mestinya memberikan pemahaman tentang dokumen keuangan kepada masyarakat dengan mengupload ke web publik.

Proses pengawasan dilakukan untuk mengendalikan adanya penyalahgunaan penggunaan anggaran sehingga rencana kegiatan tidak akan dapat dilakukan. Untuk mengurangi penyalahgunaan ini maka bukti-bukti transaksi yang sah dari setiap pembelanjaan atau pembayaran, tertib pencatatan dan pelaporan rutin harus dilakukan. Persamaan penelitian mengenai transparansi proses pengawasan APBS dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Pamela Gomez, Joel Friedman dan Isaac Shapiro yang berjudul: *“Opening Budget to Public Understanding and Debate: Results from 36 Countries”* yang menyebutkan bahwa: Keterbukaan bidang keuangan di masa yang akan datang sebagai berikut: (1) masyarakat di 36 negara yang disurvei menghendaki adanya system pembiayaan yang terbuka, selain itu sistem pembiayaan dapat dilihat dalam waktu singkat; (2) dapat teridentifikasi setiap saat setidaknya dalam satu tahun; (3) adanya keterlibatan lembaga legislative dan masyarakat; (4) membuat laporan keuangan secara terbuka ke masyarakat.

Melalui wawancara yang mendalam untuk menggali suatu informasi ada makna yang tersirat dalam transparansi pengelolaan APBS dalam perspektif Manajemen Mutu Terpadu antara lain: Transparansi pengelolaan APBS dapat dibangun dengan meningkatkan kesadaran pentingnya rencana,

manajemen kolektifitas, pemikiran yang utuh dan terpadu, komunikasi yang efektif dan koordinasi, mengikuti prosedur dan mentaati ketentuan yang berlaku, dan membangun prinsip *sence of belonging*, *continuitas* dan *factual legal*. Keterbukaan dalam berkomunikasi dan koordinasi serta meningkatnya kunci transparansi. Keterbukaan dalam pengelolaan APBS muncul karena adanya kepercayaan.

Dilihat dari pemaknaan dari penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Denny Boy dan Hotniar Siringoringo (2009) yang berjudul: “Analisa Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) terhadap Partisipasi Orang Tua Murid” yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekola mempunyai pengaruh positif terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan.

#### **4. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada Bab – bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi pengelolaan APBS dalam perspektif manajemen mutu terpadu di SMK Negeri 1 Jogonalan tahun 2012 akan tampak ketika menentukan strategi penyusunan RKAS, merealisasikan APBS, melakukan proses pengawasan APBS dan mencermati pemaknaanya. Strategi penyusunan RKAS menunjukkan bahwa: (1) kesadaran yang tinggi semua warga sekolah akan pentingnya RKAS dapat mengefektifkan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah; (2) Keterlibatan tim yang tepat akan menghasilkan RKAS yang akurat; (3) komunikasi dan koordinasi yang efektif memperlancar penyusunan.

Dilihat dari realisasi APBS dapat ditunjukkan bahwa: (1) teridentifikasi-nya sumber-sumber pendapatan sekolah akan memudahkan merealisasikan

anggaran dan belanja; (2) Pemahaman terhadap aturan perundang-undangan, petunjuk teknis, prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan sekolah memudahkan pengelolaan kegiatan yang telah direncanakan.

Proses pengawasan APBS menunjukkan: (1) keterlibatan unsur manajemen internal akan mengefektifkan keterlaksanaan pengawasan; (2) kontrol keuangan melalui pencatatan buku kas dan laporan yang efektif akan mengurangi penyimpangan. (3) bukti-bukti transaksi yang teridentifikasi dengan baik keabsahannya memperkecil terjadinya penyalahgunaan.

Makna yang dapat dilihat yakni: transparansi pengelolaan APBS dapat dibangun dengan 3 hal yakni: (1) meningkatkan kesadaran warga sekolah akan pentingnya rencana, manajemen kolektifitas, pemikiran yang utuh dan terpadu, komunikasi yang efektif dan koordinasi, ketaatan pada aturan serta terbangunnya prinsip *sence of belonging*; (2) keterbukaan dalam berkomunikasi; (3) kepercayaan warga sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amtu Onisimus, 2011, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, Bandung, Alfabeta.
- Anomin, 2010, *Manajemen Pendidikan Pedoman bagi Kepala Sekolah dan Guru*, Surakarta, Muhammadiyah University Press.
- Arcaro, Jerome S, 2007, *Pendidikan Berbasis Mutu Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Carlitz Ruth dkk, 2009, *Budget Transparency Around the World Results from the 2008*, OECD Journal on Budgeting, Volume 2009/2 ISSN 1608-7143
- Deny Boy & Siringoringo Hotniar, 2009, *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid*, Journal Ekonomi Bisnis No. 12 Vol 14.
- Gomes Pamela dkk, 2005, *Opening Budgets to Public Understanding and Debate: Results from 36 Countries*, OECD Journal on Budgeting, Volume 5 – No. 1 – ISSN 1608-7143.
- Harsono, 2007, *Pengelolaan Biaya Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Book Publisher.
- Masud By Harika, 2010, *Documents You Can Use: What the Open Budget Survey 2010 Tell Us About the Global State of Transparency*, Yale Journal off International Affairs.



- Mensah M Yaw dkk, *A Methodology for Evaluating the Cost Effectiveness of Alternatif Management Tolls in Public-Sector Institutions: An Application to Public Education*, Journal of Management Accounting Research, Volume 21.
- Mestry Raj, 2006, *The Functions of School Governing Bodies in Managing School Finances*, South Africa Journal of Education, Vol 26 (1) 27-38.
- Miles Matthew B & Huberman A Michael, 2009, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, UI Press.
- Moleong Lexy J, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Motsamani J Motsamai Dkk, 2011, *Policy and Practice Financial Management in Schools in the Mafeteng District of Lesotho*, Faculty of Education, University of the Free State, Bloemfontein, South Africa, 9300
- Mulyono, 2010, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media Group.
- Munadi, M & Barnawi, 2011, *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media.
- Syakrani & Syahrani, 2009, *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Samino, 2010, *Manajemen Pendidikan Spirit Keislaman dan Keindonesiaan*, Kartasura, Fairuz Media.
- Sri Minarti, 2011, *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan secara Mandiri*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Sutama, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*, Surakarta, Fairuz.
- Sutopo, H. B, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Surakarta, Sebelas Maret University Press.
- Terry George R & Winardi, 2010, *Asas-asas Manajemen*, Bandung, Penerbit PT Alumni.
- Tjipto Subadi, 2009, *Sosiologi dan Sosiologi Pendidikan: Suatu Kajian Boro dari Perspektif Sosiologi Fenomenologis*, Kartasura, Fairuz Media.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).